

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN *EMPTY FRUIT BUNCH* (EFB) ANTARA PT. AMP PLANTATION DAN CV. USAHA AYAH

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Fakultas



Hukum Universitas Andalas

Oleh:

AMELIA PUTRI

1810112210

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis (PK II)

Dosen Pembimbing:

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

Dr. Sri Aisyah, S.HI., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN *EMPTY FRUIT BUNCH* (EFB) ANTARA CV. USAHA AYAH DAN PT. AMP PLANTATION

(Amelia Putri, 1810112210, Program Kekhususan Hukum Bisnis (PK II), Yasniwati,

Sri Aisyah, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman, 2025)

Pelaksanaan jasa pengangkutan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa pengangkutan dibangun melalui perjanjian yang tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian, memberikan perlindungan, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini berfokus pada perjanjian pengangkutan antara PT. AMP Plantation sebagai pengguna jasa dengan CV. Usaha Ayah sebagai penyedia jasa pengangkutan *Empty Fruit Bunch* (EFB). Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang tersebut dilakukan, sekaligus menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyedia jasa apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Rumusan masalah penelitian mencakup: 1) bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan EFB antara kedua belah pihak, dan 2) bagaimana bentuk tanggung jawab CV. Usaha Ayah dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan data lapangan berupa observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait, serta data kepustakaan melalui telaah kontrak kerja yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan perjanjian pengangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian terhadap klausul identifikasi armada dalam perjanjian menimbulkan persoalan administratif dan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan antar pihak, sehingga kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, CV. Usaha Ayah memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin kejelasan identifikasi armada agar perjanjian dapat dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan hukum, sekaligus meminimalisasi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Jasa Pengangkutan, Perjanjian Kerja, Hubungan Hukum*